



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO HUKUM
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZACCARIAS ROSO PRIHATIN TJUKUP MULYONO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
3. NHK : 210126

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	221.352.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m ² /125 m ² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 221.352.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	304.750.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000		
3. MOTOR, SUZUKI SPIN SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
4. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
5. MOTOR, VESPA SPRINT SCOOTER Tahun 1968, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
6. MOBIL, MITSUBISHI MIRAGE MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	56.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	17.587.156
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---



Sub Total	Rp.	600.289.156
III. HUTANG	Rp.	147.846.335
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	452.442.821

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **22 November 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.